



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
**SALINAN**

PERATURAN MENTERI KEUANGAN  
NOMOR 109/PMK.011/2011

TENTANG

BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN  
GUNA PEMBUATAN DAN/ATAU PERBAIKAN KAPAL  
UNTUK TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka memenuhi penyediaan barang dan/atau jasa guna kepentingan umum dan meningkatkan daya saing industri pembuatan dan/atau perbaikan kapal di dalam negeri, perlu memberikan insentif fiskal berupa Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas impor barang dan bahan oleh industri pembuatan dan/atau perbaikan kapal;
- b. bahwa terhadap impor barang dan bahan oleh industri pembuatan dan/atau perbaikan kapal telah memenuhi kriteria penilaian dan ketentuan barang dan bahan untuk dapat diberikan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah sesuai ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 261/PMK.011/2010 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan Untuk Memproduksi Barang dan/atau Jasa Guna Kepentingan Umum dan Peningkatan Daya Saing Industri Sektor Tertentu Untuk Tahun Anggaran 2011;
- c. bahwa dalam rangka pemberian Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas impor barang dan bahan oleh industri pembuatan dan/atau perbaikan kapal sebagaimana dimaksud pada huruf b, telah ditetapkan pagu anggaran untuk pemberian Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2011;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 261/PMK.011/2010 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan Untuk Memproduksi Barang dan/atau Jasa Guna Kepentingan Umum dan Peningkatan Daya Saing Industri Sektor Tertentu Untuk Tahun Anggaran 2011, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan dan/Atau Perbaikan Kapal Untuk Tahun Anggaran 2011;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5167);
5. Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 63/PMK.05/2010 tentang Mekanisme Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Atas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 261/PMK.011/2010 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan Untuk Memproduksi Barang dan/atau Jasa Guna Kepentingan Umum dan Peningkatan Daya Saing Industri Sektor Tertentu Untuk Tahun Anggaran 2011;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN DAN/ATAU PERBAIKAN KAPAL UNTUK TAHUN ANGGARAN 2011.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Perusahaan adalah perusahaan yang termasuk dalam industri dengan kegiatan utama melakukan pembuatan dan/atau perbaikan kapal.
2. Barang dan Bahan Untuk Industri Pembuatan dan/atau Perbaikan Kapal yang selanjutnya disebut Barang dan Bahan adalah barang jadi, barang setengah jadi dan/atau bahan baku, termasuk suku cadang dan komponen untuk diolah, dirakit, atau dipasang, guna pembuatan dan/atau perbaikan kapal oleh Perusahaan.

Pasal 2

- (1) Bea Masuk Ditanggung Pemerintah diberikan atas impor Barang dan Bahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.
- (2) Bea Masuk Ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan belanja subsidi pajak ditanggung pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai mekanisme pelaksanaan dan pertanggungjawaban atas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- (3) Bea Masuk Ditanggung Pemerintah tidak diberikan terhadap:
- Barang dan Bahan yang dikenakan tarif umum bea masuk sebesar 0% (nol persen);
  - Barang dan Bahan yang dikenakan tarif bea masuk sebesar 0% (nol persen) berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional;
  - Barang dan Bahan yang dikenakan Bea Masuk Anti Dumping/Bea Masuk Anti Dumping Sementara, Bea Masuk Tindakan Pengamanan/Bea Masuk Tindakan Pengamanan Sementara, Bea Masuk Imbalan, Bea Masuk Tindakan Pembalasan;
  - Barang dan Bahan yang diimpor ke dalam Kawasan Berikat menggunakan dokumen Pemberitahuan Pabean Impor dengan mendapat penangguhan bea masuk dan pajak dalam rangka impor; dan/atau
  - Barang dan Bahan yang diimpor dalam rangka pemanfaatan fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor.
- (4) Bea Masuk Ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan pagu anggaran sebesar Rp20.042.500.000,00 (dua puluh miliar empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
- (5) Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara sebagai Pengguna Anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara menetapkan Direktur Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi, Kementerian Perindustrian selaku Kuasa Pengguna Anggaran untuk melaksanakan pembayaran belanja subsidi pajak ditanggung pemerintah.
- (6) Alokasi anggaran Bea Masuk Ditanggung Pemerintah dengan pagu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk Perusahaan, ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Pasal 3

- (1) Untuk memperoleh Bea Masuk Ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Perusahaan mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai dengan dilampiri Rencana Impor Barang yang telah disetujui dan ditandatangani oleh Direktur Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi, Kementerian Perindustrian.
- (2) Rencana Impor Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat elemen data sebagai berikut:
- nomor dan tanggal Rencana Impor Barang;
  - nama Perusahaan;
  - Nomor Pokok Wajib Pajak;
  - alamat;
  - kantor pabean tempat pemasukan barang;
  - uraian, jenis dan spesifikasi teknis barang;
  - pos tarif (HS);
  - jumlah/satuan barang;

2



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- i. perkiraan harga impor;
- j. negara asal;
- k. perkiraan bea masuk yang ditanggung pemerintah; dan
- l. pimpinan Perusahaan.

#### Pasal 4

- (1) Atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Direktur Jenderal Bea dan Cukai memberikan persetujuan atau penolakan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa persetujuan sebagian atau persetujuan seluruhnya atas Barang dan Bahan yang tercantum dalam Rencana Impor Barang yang dilampirkan pada permohonan yang diajukan Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) disetujui sebagian atau seluruhnya, Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas impor Barang dan Bahan guna pembuatan dan/atau perbaikan kapal oleh industri pembuatan dan/atau perbaikan kapal.
- (4) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) ditolak, Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan menyampaikan surat pemberitahuan penolakan kepada Perusahaan dengan menyebutkan alasan penolakan.

#### Pasal 5

- (1) Atas realisasi impor Bea Masuk Ditanggung Pemerintah yang pelaksanaannya didasarkan pada Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai atau Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai setempat membubuhkan cap "BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 109 /PMK.011/2011" pada semua lembar Pemberitahuan Pabean Impor.
- (2) Pemberitahuan Pabean Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipakai sebagai dasar untuk pencatatan penerimaan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah dan dialokasikan sebagai belanja subsidi pajak dalam jumlah yang sama.

#### Pasal 6

- (1) Dalam hal terdapat perbedaan antara Barang dan Bahan yang akan diimpor dengan daftar Barang dan Bahan yang terdapat dalam Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), Perusahaan dapat mengajukan permohonan perubahan Keputusan Menteri Keuangan.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai dilampiri dengan Rencana Impor Barang Perubahan yang telah disetujui dan ditandatangani oleh Direktur Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi, Kementerian Perindustrian.

#### Pasal 7

- (1) Atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Direktur Jenderal Bea dan Cukai memberikan persetujuan atau penolakan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap.
- (2) Persetujuan atas permohonan perubahan Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa persetujuan sebagian atau persetujuan seluruhnya.
- (3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 disetujui sebagian atau seluruhnya, Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas impor Barang dan Bahan guna pembuatan dan/atau perbaikan kapal oleh industri pembuatan dan/atau perbaikan kapal.
- (4) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditolak, Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan menyampaikan surat pemberitahuan penolakan kepada Perusahaan dengan menyebutkan alasan penolakan.

#### Pasal 8

Pelaksanaan dan pertanggungjawaban atas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai mekanisme pelaksanaan dan pertanggungjawaban atas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah.

#### Pasal 9

- (1) Terhadap Barang dan Bahan yang memperoleh Bea Masuk Ditanggung Pemerintah, wajib digunakan oleh Perusahaan yang bersangkutan guna pembuatan dan/atau perbaikan kapal dan tidak dapat dipindahtanggankan kepada pihak lain.
- (2) Atas penyalahgunaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan wajib membayar bea masuk yang seharusnya dibayar ditambah dengan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak dilakukan realisasi impor Bea Masuk Ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

#### Pasal 10

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2011.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Juli 2011

MENTERI KEUANGAN,

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Juli 2011

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

ttd.

PATRIALIS AKBAR


BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 419

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

  
GIARTO  
NIP. 195904201984021001



2



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN  
NOMOR 109 /PMK.011/2011  
TENTANG BEA MASUK DITANGGUNG  
PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN  
BAHAN GUNA PEMBUATAN DAN/ATAU  
PERBAIKAN KAPAL UNTUK TAHUN  
ANGGARAN 2011.

DAFTAR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN DAN/ATAU  
PERBAIKAN KAPAL YANG MENDAPAT BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH  
UNTUK TAHUN ANGGARAN 2011

NO.	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
1.	<i>Compound</i>	<i>Epoxy metal compound, epoxy concrete compound, Grouting and chocking compound</i>	3214.10.00.00
2.	<i>Marine Growth Prevention</i>	<i>Rust preventatives and corrosion inhibitors</i>	3811.90.10.00
3.	<i>Charges for Fire Extinguisher</i>	<i>Preparations and charges for fire-extinguishers; charged fire-extinguishing grenades</i>	3813.00.00.00
4.	<i>Adhesive resin dan hardener</i>	<i>Dalam bentuk pasta</i>	3903.30.90.00
5.	<i>Polymeric Plastic</i>	<i>Polyvinyl acetate in non aqueous dispersions</i>	3905.19.00.00
6.	<i>Polyurethane Resin</i>	<i>Granules, powder, paste atau liquid</i>	3909.50.00.00
7.	<i>Pipe</i>	<i>Of Plastic, class certificate for marine use</i>	3917.29.00.00
8.	<i>Fitting Pipe</i>	<i>Of Plastic, class certificate for marine use</i>	3917.40.00.00
9.	<i>Foam</i>	<i>Polimer Vinyl Chlorida (PVC) dalam bentuk foam</i>	3921.12.00.00
10.	<i>Joiner, Bulkhead and Lining</i>	<i>Partition Connected of Plastic</i>	3926.90.90.00
		<i>Partition Connected of Aluminium</i>	7616.99.90.90
11.	<i>Carpet</i>	<i>Marine use, Fireproof</i>	4016.91.90.00
12.	<i>Accomodation Panel System</i>	<i>Particle Boards</i>	4410.11.00.00
13.	<i>Rope</i>	<i>Polypropylene</i>	5607.49.00.00
		<i>Nylon</i>	5607.50.90.00
		<i>Manila</i>	5607.90.20.00
14.	<i>Curtain</i>	<i>Marine Use, Fireproof</i>	6303.92.00.00

2



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

NO.	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
15.	<i>Life Jacket, Life Buoy</i>	<i>for Marine Use</i>	6307.20.00.00
16.	<i>Insulation</i>	<i>Mineral wool plate type rockwool or equal, polyurethane</i>	6806.10.00.00
17.	<i>Toilet System</i>	<i>Macerator toilet and vacuum toilet system, porcelen material</i>	6910.10.00.00
18.	<i>Toilet System</i>	<i>Macerator toilet and vacuum toilet system, Aluminium material</i>	6910.90.00.00
		<i>Stainless Steel</i>	7324.90.90.00
19.	<i>Tank Level Gauges/Sight Glass or Level Glass</i>	<i>Measuring glass</i>	7020.00.90.00
20.	<i>Grating</i>	<i>Fibre Glass (Tahan Api)</i>	7020.00.90.00
21.	<i>Steel Ship Plate</i>	<i>Steel Grade A, B of thickness &gt; 25 mm dan/atau thickness &lt; 25 mm, width &gt; 1.800 mm</i>	7208.51.00.00
			7208.52.00.00
			7208.53.00.00
			7208.54.00.00
		<i>Steel Grade D, E, EH, AH of thickness &gt; 10 mm dan/atau thickness &lt; 10 mm, width &gt; 1.800 mm</i>	7208.51.00.00
			7208.52.00.00
<i>Steel Grade A, B, D, E, EH, AH of thickness &lt; 6 mm, width &gt; 1.800 mm</i>	7208.53.00.00		
	7208.54.00.00		
	7208.54.00.00		
22.	<i>Corrugated Plate</i>	<i>Grade A baja bukan paduan dengan lebar kurang dari 600 mm, bergelombang dengan karbon diatas 0,6 %. Tidak dilapisi, tidak disepuh, tidak dipalut</i>	7211.90.90.00
23.	<i>Steel Bar</i>	<i>Grade A (Forged Bar) Round Bar dari baja bukan paduan dengan kandungan karbon lebih dari 0,6%</i>	7214.10.21.00

8





MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

NO.	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
		Grade A ( <i>Forged Bar</i> ) <i>Square Bar</i> dari baja bukan paduan dengan kandungan karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya	7214.10.19.00
		Grade A ( <i>Forged Bar</i> ) <i>Square Bar</i> dari baja bukan paduan dengan kandungan karbon lebih dari 0,6% menurut beratnya	7214.10.29.00
24.	<i>Steel Bar or Iron Bar</i>	Grade A ( <i>Flat Bar</i> ) dengan kandungan karbon 0,6% atau lebih menurut beratnya, tidak dikerjakan lebih lanjut selain <i>cold-formed</i> atau <i>cold-finished</i>	7215.50.10.00
		Grade A ( <i>Flat Bar</i> ) dengan kandungan karbon 0,6% atau kurang menurut beratnya, tidak dikerjakan lebih lanjut selain <i>cold-formed</i> atau <i>cold-finished</i>	7215.50.90.00
25.	<i>Bulb Flat, Profile (Equal or Unequal), T sections</i>	Grade A	7216.22.00.00
26.	<i>Bulb Flat, Profile (Equal or Unequal), T sections</i>	Grade A dengan tinggi 80 mm atau lebih, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik atau diekstrusi	7216.40.00.00
27.	<i>Stainless Steel Plate</i>	Dengan lebar 600 mm atau lebih, ketebalan 1,5 mm - 125 mm, dengan pola relief	7219.90.10.00
		Dengan lebar 600 mm atau lebih, ketebalan kurang dari 1,5 mm, tanpa pola relief	7219.90.20.00
		Dengan lebar 600 mm atau lebih, ketebalan diatas 125 mm, dengan atau tanpa pola relief	7219.90.90.00
28.	<i>Bar and Rod of Stainless Steel</i>	Dengan penampang silang lingkaran, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi	7222.11.00.00

2



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

NO.	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
		Dengan penampang segiempat, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi	7222.19.00.00
29.	<i>Profile of Stainless Steel</i>	<i>Angle, shape and section</i>	7222.40.00.00
30.	<i>Tubes and pipes of Cast Iron</i>	<i>With an external diameter &lt; 100 mm</i>	7303.00.10.10
		<i>With an external diameter 100 mm - 150 mm</i>	7303.00.10.20
		<i>With an external diameter 150 mm - 600 mm</i>	7303.00.10.30
		<i>With an external diameter &gt; 600 mm</i>	7303.00.10.90
31.	<i>Hollow profiles, of cast iron</i>	<i>For Marine Use</i>	7303.00.90.10
			7303.00.90.90
32.	<i>Seamless Pipe</i>	<i>Carbon Steel</i>	7304.39.00.00
		<i>Stainless Steel</i>	7304.49.00.00
		<i>Cooper Nickel</i>	7411.22.00.00
		<i>Alloy Steel selain dari Stainless Steel</i>	7304.59.00.00
33.	<i>Hollow Profiles</i>	<i>Alloy Steel</i>	7304.51.90.00
			7304.59.00.00
34.	<i>Welded pipes and tubes</i>	<i>Stainless Steel</i>	7306.11.00.00
35.	<i>Welded pipes and tubes</i>	<i>Carbon Steel</i>	7306.19.00.00
36.	<i>Other Bundy-weld pipes and tubes</i>	<i>Other than Bundy-weld pipes and tubes With internal diameter &lt; 12,5 mm</i>	7306.90.90.10
		<i>Other than Bundy-weld pipes and tubes With internal diameter &gt; 12,5 mm</i>	7306.90.90.90
37.	<i>Stainless Pipe Fitting</i>	<i>Flanges</i>	7307.21.00.00
		<i>Elbows, bends and sleeves</i>	7307.22.00.00
		<i>Butt welding fittings</i>	7307.23.00.00

2



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

NO.	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
		<i>Tees, Reducers</i>	7307.29.00.00
38.	<i>Carbon steel pipe Fitting</i>	<i>Flanges</i>	7307.91.00.00
		<i>Elbows, bends and sleeves</i>	7307.92.00.00
		<i>Butt welding fittings</i>	7307.93.00.00
		<i>Tees, Reducers</i>	7307.99.00.00
39.	<i>Cast fitting</i>	<i>Of non-malleable cast iron</i>	7307.11.00.00
40.	<i>Cast fitting</i>	<i>Of Malleable cast iron</i>	7307.19.00.00
41.	<i>Oil Tank Hatches</i>	<i>Other structure of iron or steel</i>	7308.90.90.00
42.	<i>Doors, Windows, Frame &amp; accessories</i>	<i>Iron &amp; Steel</i>	7308.30.00.00
		<i>Copper</i>	7419.99.10.00
43.	<i>Conveyor</i>	<i>Jala Stainless Steel dilapisi Fibreglass</i>	7314.49.00.00
44.	<i>Kenter schackle, swivel piece, chain stopper &amp; tools for chain</i>	<i>Of other than mild steel</i>	7315.90.90.00
		<i>Of Cast Iron</i>	7325.99.90.00
45.	<i>Chain for Conveyor</i>	<i>Of Stainless Steel</i>	7315.11.29.00
46.	<i>Anchor Chain</i>	<i>Of iron or Steel</i>	7315.12.00.00
47.	<i>Stud link chain</i>	<i>Of other than mild steel</i>	7315.81.90.00
48.	<i>Anchor</i>	<i>Of iron or steel</i>	7316.00.00.00
49.	<i>Galley and Pantry Equipment</i>	<i>Stainless Steel Tub</i>	7324.10.00.00
50.	<i>Grating plate</i>	<i>Galvanized Steel</i>	7325.99.90.00
51.	<i>Stern Frame, Stern Bushing</i>	<i>Iron or Steel Casting</i>	7325.99.90.00
52.	<i>Stud link chain</i>	<i>of Cast Iron</i>	7325.99.90.00
53.	<i>Ships Rudder</i>	<i>Iron or Steel</i>	7326.90.10.00
54.	<i>Rudder Stock &amp; Fitting</i>	<i>Iron or Steel</i>	7326.90.90.00
55.	<i>Towing Hook Set</i>	<i>Untuk penarik tongkang dengan kapasitas 5 - 30 ton</i>	7326.90.90.00

8



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

NO.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
		Dengan penampang segiempat, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi	7222.19.00.00
29.	<i>Profile of Stainless Steel</i>	<i>Angle, shape and section</i>	7222.40.00.00
30.	<i>Tubes and pipes of Cast Iron</i>	<i>With an external diameter &lt; 100 mm</i>	7303.00.10.10
		<i>With an external diameter 100 mm - 150 mm</i>	7303.00.10.20
		<i>With an external diameter 150 mm - 600 mm</i>	7303.00.10.30
		<i>With an external diameter &gt; 600 mm</i>	7303.00.10.90
31.	<i>Hollow profiles, of cast iron</i>	<i>For Marine Use</i>	7303.00.90.10
			7303.00.90.90
32.	<i>Seamless Pipe</i>	<i>Carbon Steel</i>	7304.39.00.00
		<i>Stainless Steel</i>	7304.49.00.00
		<i>Cooper Nickel</i>	7411.22.00.00
		<i>Alloy Steel selain dari Stainless Steel</i>	7304.59.00.00
33.	<i>Hollow Profiles</i>	<i>Alloy Steel</i>	7304.51.90.00
			7304.59.00.00
34.	<i>Welded pipes and tubes</i>	<i>Stainless Steel</i>	7306.11.00.00
35.	<i>Welded pipes and tubes</i>	<i>Carbon Steel</i>	7306.19.00.00
36.	<i>Other Bundy-weld pipes and tubes</i>	<i>Other than Bundy-weld pipes and tubes With internal diameter &lt; 12,5 mm</i>	7306.90.90.10
		<i>Other than Bundy-weld pipes and tubes With internal diameter &gt; 12,5 mm</i>	7306.90.90.90
37.	<i>Stainless Pipe Fitting</i>	<i>Flanges</i>	7307.21.00.00
		<i>Elbows, bends and sleeves</i>	7307.22.00.00
		<i>Butt welding fittings</i>	7307.23.00.00



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

NO.	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
56.	<i>Shafting for propulsion</i>	<i>of Iron, Steel and Stainless</i>	7326.90.90.00
57.	<i>Ladder</i>	<i>Iron or Steel</i>	7326.90.90.00
		<i>Aluminium</i>	7610.90.90.00
58.	<i>Copper Sheets, Plates &amp; Strip of thickness exceeding 0.15 mm</i>	<i>of refined copper in coils</i>	7409.11.00.00
		<i>of bronze in coils</i>	7409.31.00.00
		<i>of Cupro-nickel or Nickel-silver</i>	7409.40.00.00
59.	<i>Copper Pipes</i>	<i>Refined Copper</i>	7411.10.00.00
60.	<i>Copper Pipes</i>	<i>Bronze</i>	7411.29.00.00
61.	<i>Pipe Fitting</i>	<i>of refined copper</i>	7412.10.00.00
		<i>Copper alloys of copper-zinc base alloys (brass)</i>	7412.20.10.00
		<i>Copper alloys other than of copper-zinc base alloys (brass)</i>	7412.20.90.00
62.	<i>Bars &amp; Rods of Aluminium Alloy</i>	<i>Extruded &amp; not surface treated</i>	7604.29.10.10
		<i>Extruded &amp; surface treated</i>	7604.29.10.20
		<i>non extruded</i>	7604.29.90.00
63.	<i>Aluminium &amp; Aluminium Alloy</i>	<i>Sheets dengan Lebar &gt; 1.000 mm.</i>	7606.12.39.20
			7606.12.39.90
64.	<i>Aluminium &amp; Aluminium Alloy</i>	<i>Plates, Strips and Coiled</i>	7606.12.90.00
65.	<i>Aluminium &amp; Aluminium Alloy</i>	<i>Chequered plate</i>	7606.91.20.00
66.	<i>Pipes/Tubes</i>	<i>Aluminium</i>	7608.10.00.00
		<i>Aluminium Alloys</i>	7608.20.00.00
		<i>Aluminium</i>	7609.00.00.00
67.	<i>Doors, Windows, Frame &amp; accessories</i>	<i>Aluminium</i>	7610.10.00.00

2



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

NO.	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
68.	<i>Furniture</i>	<i>Aluminium</i>	7610.90.90.00
69.	<i>Hatch Deck &amp; Side Scuttless</i>	<i>Aluminium</i>	7610.90.90.00
70.	<i>Ship Ratchet Spanners</i>	<i>Non-Adjustable</i>	8204.11.00.00
71.	<i>Multi Core Tube</i>	<i>of Iron or steel</i>	8307.10.00.00
72.	<i>Ships Boilers &amp; Economizer</i>	<i>Steam, Thermal Oil, For Marine Use</i>	8403.10.00.00
73.	<i>Parts of boiler</i>	<i>Bodies or shells</i>	8403.90.10.00
		<i>Other than bodies or shells</i>	8403.90.90.00
74.	<i>Auxiliary Ships Boiler</i>	<i>Steam, Thermal Oil, For Marine Use</i>	8404.10.20.00
75.	<i>Diesel Engine for marine use</i>	<i>of a power not exceeding 750 kW</i>	8408.10.40.00
76.	<i>Hand Pumps tidak dilengkapi alat ukur</i>	<i>Water Pump</i>	8413.20.10.00
		<i>Other than Water Pumps</i>	8413.20.90.00
77.	<i>Pumps For Marine Use Digerakan secara elektrik</i>	<i>Motor Driven Gear (berputar)</i>	8413.60.10.00
		<i>Motor Driven Centrifugal</i>	8413.70.29.00
		<i>Motor Driven Screw</i>	8413.81.10.00
78.	<i>Pumps For Marine Use Digerakan secara non elektrik</i>	<i>Diesel driven</i>	8413.70.30.00
79.	<i>Sewage Treatment Plant</i>	<i>for Marine Use</i>	8413.82.10.00
80.	<i>Ventilation Fan</i>	<i>for Marine Use</i>	8414.60.90.00
81.	<i>Ship Blower</i>	<i>Digerakan secara listrik</i>	8414.80.91.10
82.	<i>Air Conditioning or Cooling System For Marine Use</i>	<i>Incorporating a Refrigerating Unit</i>	8415.82.90.00
		<i>Not Incorporating a Refrigerating Unit</i>	8415.83.90.00
83.	<i>Refrigerating Plant for Ship</i>	<i>for Marine Use</i>	8418.50.10.00
		<i>for Marine Use</i>	8418.50.90.00

8



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

NO.	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
84.	<i>Electric Refrigerator</i>	<i>Marine Use, Of Frequency 60 Hz. Voltage 440 Volt, Of frequency 50 Hz Voltage 380 Volt</i>	8418.10.90.00
85.	<i>Water Heater for Ship</i>	<i>for Marine Use</i>	8419.19.90.00
86.	<i>Heat Exchanger Unit</i>	<i>Other electrically operated</i>	8419.50.40.00
87.	<i>Drinking Water Fountain</i>	<i>Marine Use, Electrical Source: Main 440V x 60Hz x 3 Phase &amp; Control 220V x 60Hz x 1 Phase</i>	8419.89.19.00
88.	<i>Drinking Water UV Sterilizer</i>	<i>Marine Use, Electrical Source: Main 440V x 60Hz x 3 Phase &amp; Control 220V x 60Hz x 1 Phase</i>	8419.89.19.00
89.	<i>Dryer</i>	<i>Marine Use, Electrical Source: Main 220V or 440V x 60Hz x 3 Phase</i>	8421.12.00.10
90.	<i>Sea Water &amp; Oil Strainers</i>	<i>for Marine Use</i>	8421.23.91.00
91.	<i>Oil &amp; Fuel Purifier</i>	<i>for Marine Use</i>	8421.23.99.00
92.	<i>Fire Fighting Equipment</i>	<i>Electrically operated</i>	8424.30.10.00
93.	<i>Fire Fighting Equipment</i>	<i>Not Electrically operated</i>	8424.30.20.00
94.	<i>Crane for Ship Use</i>	<i>Overhead Crane</i>	8426.11.00.00
95.	<i>Crane for Ship Use</i>	<i>Cargo Handling</i>	8426.30.00.00
96.	<i>Washing Machine</i>	<i>Marine Use, Electrical Source: Main 220V or 440V x 60Hz x 3 Phase</i>	8450.11.10.00
97.	<i>Clear View Screen and Wiper</i>	<i>for Marine Use</i>	8479.89.30.00
98.	<i>Valve for Marine Use</i>	<i>Having inlet and outlet internal diameters of more than 40 cm</i>	8481.80.74.00
		<i>Manually operated sluice or gate valves with inlets or outlets of an internal diameter exceeding 5 cm but not exceeding 40 cm</i>	8481.80.61.00
		<i>Cast iron gate valves with an inlet diameter of 4 cm or more and cast iron butterfly valves with an inlet diameter of 8 cm or more</i>	8481.80.62.00

8



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

NO.	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
		<i>Other Water Pipeline Valves</i>	8481.80.63.00
		<i>Having inlet and outlet internal diameters of more than 5 cm but not more than 40 cm</i>	8481.80.73.00
99.	<i>Gear Box</i>	<i>of an output not exceeding 22.38 kW</i>	8483.40.21.00
		<i>of an output more than 22.38 kW</i>	8483.40.29.00
100.	<i>Propeller, Bow Thruster &amp; Stern Thruster</i>	<i>for Marine Use</i>	8487.10.00.00
101.	<i>Universal AC/DC motors</i>	<i>of an output exceeding 1 kW</i>	8501.20.20.00
102.	<i>Electric Motor Single Phase</i>	<i>of an output exceeding 1 kW</i>	8501.40.20.00
103.	<i>Electric Motor Multi Phase</i>	<i>of an output not exceeding 750 W</i>	8501.51.00.00
104.	<i>Electric Motor Multi Phase</i>	<i>of an output exceeding 37.5 kW</i>	8501.52.30.00
105.	<i>Hydraulic Power Pack</i>	<i>of an output between 1-37.5 kW</i>	8501.52.20.00
		<i>of an output not exceeding 37.5 kW</i>	8501.52.30.00
106.	<i>Generator AC (alternator) for marine use</i>	<i>Of an output not exceeding 12.5 kVA</i>	8501.61.10.00
		<i>Of an output exceeding 12.5 kVA but less than 75 kVA</i>	8501.61.20.00
		<i>Of an output exceeding 75 kVA but not exceeding 150 kVA</i>	8501.62.10.00
		<i>Of an output exceeding 150 kVA but not exceeding 375 kVA</i>	8501.62.90.00
		<i>Of an output exceeding 375 kVA but not exceeding 750 kVA</i>	8501.63.00.00
		<i>Of an output exceeding 750 kVA</i>	8501.64.00.00
107.	<i>Generator Diesel Engine</i>	<i>Of an output not exceeding 125 kVA</i>	8502.12.10.00
		<i>Of an output exceeding 125 kVA</i>	8502.12.90.00
108.	<i>Transformator for Marine Use/Standard</i>	<i>With power handling capacity not exceeding 10kVA</i>	8504.32.41.00

8





MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

NO.	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
		<i>With power handling capacity not exceeding 10kVA</i>	8504.32.49.00
		<i>With power handling capacity exceeding 10kVA</i>	8504.32.51.00
		<i>With power handling capacity exceeding 10kVA</i>	8504.32.59.00
109.	<i>Battery Storage</i>	<i>Marine Lead Acid Battery</i>	8507.20.90.00
110.	<i>Dust Collector</i>	<i>for Cement Vessel</i>	8508.19.00.00
111.	<i>Navigation Lighting</i>	<i>for Marine Use</i>	8512.20.20.00
112.	<i>Electric Cooking Range</i>	<i>Marine Use, Electrical Source: Main 440V x 60Hz x 3 Phase &amp; Control 220V x 60Hz x 1 Phase</i>	8516.60.90.00
113.	<i>Water Boiler (Water Kettle), Soup Boiler</i>	<i>Marine Use, Electrical Source: Main 440V x 60Hz x 3 Phase &amp; Control 220V x 60Hz x 1 Phase</i>	8516.79.10.00
114.	<i>Sound recording or reproducing apparatus</i>	<i>for Marine Use</i>	8519.89.90.00
115.	<i>Radar</i>	<i>for Marine Use</i>	8526.10.10.00
116.	<i>Radio Communication/ Navigational Aid apparatus</i>	<i>for Marine Use</i>	8526.91.10.00
117.	<i>Integrated Automation System &amp; Control Monitoring System</i>	<i>Main Control</i>	8526.92.00.00
118.	<i>Fire Detection System, Smoke detector</i>	<i>for Marine Use</i>	8531.10.30.00
119.	<i>Motor Sirens</i>	<i>for Marine Use</i>	8531.10.90.00
120.	<i>Fixed Gas Detection System</i>	<i>For fire fighting system</i>	8531.10.90.00
121.	<i>Foghorn &amp; Air Whistle</i>	<i>for Marine Use</i>	8531.80.19.00
122.	<i>Electric Bells &amp; Horns</i>	<i>for Marine Use</i>	8531.80.19.00
123.	<i>Circuit Breaker and Switch Control</i>	<i>Automatic, moulded case type</i>	8536.20.10.00

2



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

NO.	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
124.	<i>Circuit Breaker and Switch Control</i>	<i>Automatic, non moulded case type</i>	8536.20.90.00
125.	<i>Marine Lighting Fixture &amp; Accosseries</i>	<i>for a voltage exceeding 1 kV - 40 kV</i>	8535.30.10.00
126.	<i>Shore Connection Box</i>	Kapasitas kurang dari 16 Amp	8536.90.21.00
		Selain dari kegunaan rumah tangga	8536.90.29.00
127.	<i>Switchboards, Control Panels &amp; Distribution Boards</i>	<i>For voltage not exceeding 1,000 V</i>	8537.10.10.00
128.	<i>Switchboards, Control Panels &amp; Distribution Boards</i>	<i>For voltage not exceeding 1,000 V</i>	8537.10.20.00
		<i>For voltage not exceeding 1,000 V</i>	8537.10.90.00
129.	<i>Crimp Terminal Boards and Switch Board for Marine Use</i>	<i>For voltage not exceeding 1,000 V</i>	8538.10.19.00
130.	<i>Remote Control Valve System</i>	<i>for Marine Use</i>	8543.70.20.00
131.	<i>Electric Cable and Other Miscellaneous Material</i>	<i>for a voltage exceeding 80 V - 1,000 V</i>	8544.49.40.00
132.	<i>Inflatable Life Raft</i>	<i>For Marine Use</i>	8907.10.00.00
133.	<i>Binocular</i>	<i>For Marine Use</i>	9005.10.00.00
134.	<i>Monocular</i>	<i>For Marine Use</i>	9005.80.90.00
135.	<i>Compasses</i>	<i>for Marine Use</i>	9014.10.00.00
136.	<i>Echo Sounder, Speed Log, Auto Pilot, Fish Finder, Sextant &amp; Ship's Clinometers</i>	<i>Instrument &amp; Peralatan Navigasi for Marine Use</i>	9014.80.10.00
137.	<i>Transducer</i>	<i>for Marine Use</i>	9014.90.10.00
138.	<i>Anemometer</i>	<i>for Marine Use</i>	9015.80.90.00
139.	<i>Emergency Escape Breathing Device</i>	<i>for Marine Use</i>	9020.00.00.00
140.	<i>Marine Thermometer and Temperature Control System</i>	<i>Liquid filled, for direct reading</i>	9025.11.00.00
		<i>Electrically Operated</i>	9025.19.10.00

2



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

NO.	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
141.	<i>Barometer</i>	<i>Electrically Operated</i>	9025.80.20.00
142.	<i>Fixed Gas Detection System</i>	<i>For gas leaking</i>	9027.10.10.00
143.	<i>Ship Cargo Tank System</i>	<i>Hidrolik atau pneumatik</i>	9032.81.00.00
144.	<i>Oil Discharge Monitor (ODM)</i>	<i>for Marine Use</i>	9032.89.10.00
145.	<i>Loading Computer</i>	<i>for Marine Use</i>	9032.89.10.00
146.	<i>Ship Alarm, Control &amp; Monitoring System</i>	<i>Marine Use</i>	9032.89.39.00
147.	<i>Impressed Current Cathodic Protection</i>	<i>Electrically Cathodic</i>	9032.89.90.00
148.	<i>Pilot Chair</i>	<i>for Marine Use</i>	9401.80.90.00
149.	<i>Scanjet tank cleaning machine</i>	<i>Electrically/not electrically operated</i>	8424.89.90.00

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO

NIP. 195904201984021001



MENTERI KEUANGAN,

ttd,

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

2